

URGENSI LEMBAGA PENYIARAN DI KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI WUJUD KEHADIRAN NEGARA

Mahendra Putra Kurnia¹

Hasmar Kurniawan²

PROBLEMATIKA KAWASAN PERBATASAN NKRI

Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang berbatasan darat dan laut dengan 10 negara. Negara-negara yang memiliki perbatasan laut dengan Indonesia yakni : Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Australia, dan Palau. Sedangkan negara-negara yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia yakni : Malaysia, Timor Leste dan Papua New Guinea. Kawasan Perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangganya tersebut merupakan kawasan yang begitu panjang, dengan tipologi yang sangat bervariasi, baik di wilayah pedalaman maupun pulau-pulau terluar telah menghadirkan berbagai permasalahan yang begitu kompleks, sehingga diperlukan manajemen pengelolaan perbatasan dan pulau-pulau terluar yang terintegrasi secara komprehensif dan efektif³.

Untuk menjamin tetap terpeliharanya kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat setempat, diperlukan keberpihakan dan perhatian khusus terhadap upaya pembangunan wilayah-wilayah di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. Keberpihakan tersebut terimplementasi dalam pergeseran paradigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari yang selama ini cenderung berorientasi “*inwardlooking*”, menjadi “*outwardlooking*” sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pengelolaan perbatasan negara pun, telah terdapat pergeseran dengan mengedepankan kombinasi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang dilaksanakan secara serasi dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environmental approach*)⁴.

Kawasan perbatasan merupakan pintu masuk atau *entry point* bagi sebuah negara. Maka selayaknya pembangunan di kawasan perbatasan harus menjadi prioritas utama. Rencana pembangunan kawasan perbatasan memang telah mengalami pergeseran paradigma namun hanya sampai pada tahapan perubahan paradigma, belum menyentuh pada tahapan implementasi. Tanpa bermaksud mengurangi apresiasi atas kinerja pemerintah selama ini, namun memang kenyataannya dapat dikatakan bahwa kondisi kawasan perbatasan masih jauh dari layak dapat dikatakan sebagai beranda depan negara.

¹ Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H, M.H, Pengajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

² Mahasiswa Fakultas Hukum, Konsentrasi Agraria, Universitas Mulawarman.

³ Lihat Majalah Internal KEMENKO POLHUKAM NUSA KHATULISTIWA, *Pengembangan Wilayah Perbatasan Guna Menjamin Keutuhan Wilayah NKRI*, Edisi 2/Mei 2012. Hlm. 26.

⁴ *Ibid*, hlm. 26.

Kondisi di kawasan perbatasan masih dalam kondisi yang kurang baik, tercatat beberapa peristiwa di kawasan perbatasan yang menuntut agar kawasan perbatasan lebih diperhatikan. Beberapa peristiwa tersebut terjadi antara tahun 2011 hingga akhir 2014, diantaranya : belum selesainya batas di laut antara Indonesia-Malaysia di Selat Malaka yang mengakibatkan ditahannya nelayan Malaysia oleh aparat Indonesia yang kemudian ditukar dengan aparat Indonesia yang ditahan oleh Malaysia⁵, selanjutnya menyusul ditangkapnya dua kapal nelayan Malaysia oleh aparat Indonesia di Selat Malaka. Kemudian dikejar oleh helikopter Malaysia, namun karena aparat Indonesia tetap bersikukuh membawa kedua kapal nelayan Malaysia tersebut, akhirnya helikopter Malaysia tidak berani mengejar hingga ke wilayah laut Indonesia⁶.

Berita yang paling terbaru mengenai kawasan perbatasan adalah tuntutan 10 desa di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang mengancam akan berintegrasi ke Malaysia jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat⁷. Sayang sekali dalam menangani permasalahan ini, pemerintah pusat cenderung terlambat merespon tuntutan masyarakat tersebut. Pemerintah pusat baru mengirimkan tim untuk meninjau langsung di lokasi tersebut pada 12 November, sementara pemerintah daerah telah melakukan kunjungan pada 31 Oktober⁸. Kemudian isu mengenai klaim Malaysia atas 3 Desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara⁹. Bukan hanya permasalahan disintegrasi atau permasalahan batas maritim yang belum selesai, namun penjarahan kekayaan alam di kawasan perbatasan di laut juga marak terjadi. Data *Food Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan bahwa perairan disekitar laut Arafuru merupakan kawasan laut di dunia yang rawan terjadi penjarahan. Sekitar 4 trilyun pertahun sumberdaya perikanan terus dijarah di kawasan tersebut¹⁰.

Unsur yang paling penting dari sebuah negara adalah wilayah. Demikian pentingnya wilayah ini, membuat orientasi negara-negara di era klasik terfokus hanya pada upaya bagaimana menjaga wilayahnya. Hal tersebut membuat suatu negara begitu mudah untuk melakukan peperangan dengan negara tetangganya. Tujuannya, tentu untuk meluaskan

⁵ Artikel "Insiden Perbatasan; Tak Menanggapi, Berarti Akui Salah" dan "Insiden Tanjung Berakit; Di Laut Kita Penonton" Kompas Minggu 22 Agustus 2010, hlm.2 dan 10, dalam Mahendra Putra Kurnia, *Kawasan Perbatasan RI : Kesabaran Tak Berbatas Menanti Janji Sebatas Janji*, hlm. 6. Artikel diunduh melalui web www.mahendraputra.net, pada tanggal 10 September 2014, pukul 16.00 Wita.

⁶ Seri Diskusi KBRI Canberra, Australia pada tanggal 3 juni 2011, presentasi dibawakan oleh I Made Andi Arsana, dengan Tema *Batas Maritim dalam Konteks IUU Fishing*.

⁷ Mengenai tuntutan Masyarakat di 10 desa tersebut dapat dilihat di Kaltim Post edisi Senin, 27 Oktober 2014, hlm. 42. Adapun ke 10 desa tersebut adalah Desa Long Pananeh I, Long Pananeh II, Long Pananeh III, Tiong Ohang, Tiong Buu, Noha Tifab, Long Apari, Long Kerioq, Noha Silat, dan Noha. Kesemua desa tersebut berada di Kecamatan Long Apari, yang memang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

⁸ Lihat Kaltim Post, *Pusat Telat Kebakaran Jenggot : Kirim Tim Investigasi ke Mahulu, Isu 10 Desa Menyeberang ke Malaysia* edisi Rabu 12 November 2014, hlm. 1.

⁹ Lihat Kaltim Post, *Wapres Khawatir Kedaulatan RI Terancam : Klaim Malaysia Atas Tiga Desa di Nunukan*, edisi sabtu, 15 November 2014, hlm. 1.

¹⁰ Warta berita RRI Jakarta, 2 November 2014 Siaran Langsung yang disiarkan pada pukul 08.07 WIB,

wilayah demi mempertahankan eksistensi negaranya. Pada era modern, tidak ada negara di dunia ini yang tidak memiliki wilayah dan pasti memiliki batas-batas sejauh mana kedaulatan dan hak berdaulatnya¹¹. Perbatasan penting karena perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya¹². Demikian penting arti wilayah, terutama yang berbatasan dengan wilayah negara lain, dalam hal ini adalah kawasan perbatasan. Selain sebagai tanda sejauh mana saja wilayah suatu negara, kawasan perbatasan juga sebagai tanda kedaulatan, kewibawaan, kemajuan, bahkan kekuatan suatu negara. Kedaulatan, kewibawaan, kemajuan, dan kekuatan suatu negara telah dapat diukur dari kawasan perbatasannya, karena kawasan perbatasan merupakan *entry point* (halaman depan) suatu negara.

Melihat arti penting kawasan perbatasan di atas, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia mempunyai politik hukum pengembangan kawasan perbatasan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah politik hukum pengembangan kawasan perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi apa yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah terhadap wilayah yang dikuasainya, terutama di kawasan perbatasan¹³.

Negara secara umum memiliki sejumlah tujuan yang ditujukan untuk memakmurkan, melindungi dan mengayomi setiap yang menjadi tanggung jawabnya selama masih berada dalam kedaulatan negaranya. Tujuan negara itu dalam banyak hal tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat daripada kekuasaan penguasa. Karena mungkin apa yang dalam waktu 100 atau 200 tahun yang lalu tidak menjadi tugas negara, pada masa sekarang ini menjadi tugas negara yang amat penting, misalnya soal ekonomi¹⁴.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara, tujuan dan fungsi negara tersebut terkandung dalam sumber hukum tertinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), alinea kedua yaitu, Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dilanjutkan pada alinea keempat, tujuan dari membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial¹⁵.

Dari segi pembangunan dan pengembangan di kawasan perbatasan, pertanyaannya adalah, apakah selama ini cita-cita dan tujuan negara Indonesia seperti yang tercantum dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD NRI 1945 telah menjadi landasan

¹¹ Mahendra Putra Kurnia, *Upaya Penegakan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia*, Samarinda : Jurnal Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume 2, Nomor 1, Juni 2006, hlm. 49.

¹² *Ibid*, hlm. 51.

¹³ Mahendra Putra Kurnia, *Hukum Kewilayahan Indonesia : Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*, Malang : UB Press, 2011, hlm. 2.

¹⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1991, hlm. 148.

¹⁵ Mahendra Putra Kurnia, *Op.Cit*, hlm. 3.

filosofis dalam setiap politik hukum yang sedang dan akan dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI ?. Dapat dikatakan bahwa cita dan tujuan negara tersebut belum tercapai seutuhnya. Pemerintah Indonesia tampak belum bisa seutuhnya mewujudkan persatuan, kedaulatan, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini terbukti dari masih adanya separatisme dan wilayah-wilayah utamanya di kawasan perbatasan yang berpotensi konflik dan bisa saja berpindah kepemilikan ke negara lain ¹⁶.

Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan tidak akan mudah, mengingat luasnya wilayah yang dimiliki oleh Indonesia. Terlebih kawasan perbatasan sebagian masih berupa daerah pedalaman, terisolir dan terpencil. Untuk melakukan pembangunan tentu membutuhkan waktu cukup lama dan pendanaan yang besar. Sangat sulit membantah anggapan bahwa masyarakat kawasan perbatasan mengalami masa-masa sulit dalam aktifitas keseharian akibat keterbatasan infrastruktur dan sarana komunikasi ¹⁷.

LEMBAGA PENYIARAN : WUJUD KEHADIRAN NEGARA

Problematika yang terjadi di Kawasan Perbatasan tersebut merupakan bukti kurangnya kehadiran negara di kawasan Perbatasan. Barangkali kita akan maklum jika kurangnya kehadiran negara di kawasan perbatasan disebabkan karena luasnya wilayah Republik Indonesia. Namun justru kondisi geografis yang begitu luas sebagaimana yang dimiliki oleh Indonesia harus diatasi dengan penggunaan teknologi. Teknologi yang tepat untuk mengurangi luas dan jarak yang demikian besar tersebut adalah melalui teknologi media siaran-siaran televisi maupun radio. Dengan program-program siaran yang ada, maka kurangnya wujud kehadiran negara di kawasan perbatasan dapat diatasi dengan program-program dari lembaga penyiaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa media penyiaran merupakan media yang paling besar dapat mempengaruhi pemikiran manusia saat ini ¹⁸. Dengan media, maka wujud minim kehadiran negara di kawasan perbatasan akan berkurang karena ada jembatan, ada koneksitas yang menjadi penghubung dari jurang pemisah antara pemerintah pusat dengan warganya yang berada nun jauh di perbatasan sana. Dengan media penyiaran, rakyat di kawasan perbatasan juga akan merasa tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang seutuhnya, karena mereka selalu mengikuti perkembangan situasi apa saja yang terjadi di kota-kota besar, dan secara tidak langsung turut pula menjadi bagian dari laju aktivitas yang ada di kota-kota besar.

Peran dari lembaga penyiaran amat besar dalam menumbuhkan dan memperkokoh semangat kebangsaan. Untuk itu, lembaga penyiaran resmi milik pemerintah yakni Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) harus menunjukkan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kaltim Post, Rubrik Komunikasi Sosial, *Perbatasan Perlu Perhatian Lebih*, edisi Kamis 20 November 2014, hlm. 42.

¹⁸ Malaysia dan Jepang merupakan negara yang paling mampu memanfaatkan peran media dalam memperkokoh dan menumbuhkan nasionalisme warga negaranya. Pengisi suara (dubber) kartun anak-anak *Upin & Ipin* yang diproduksi oleh Malaysia tatkala diwawancara oleh salah satu stasiun TV swasta Indonesia, mengatakan bahwa *Upin & Ipin* merupakan media yang paling ampuh untuk menanamkan nilai-nilai budaya ke anak-anak. Juga kartun *Captain Tsubasa* yang begitu tenar di tahun 70 an. Semenjak itu, semua anak-anak di Jepang bercita-cita menjadi pesepakbola. Beberapa tahun kemudian di Olimpiade, Jepang mampu mengalahkan tim "Matador", Spanyol.

eksistensinya dalam menumbuhkembangkan nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan. TVRI dan RRI merupakan satu-satunya lembaga penyiaran yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Adapun sifat siarannya bersifat independen, netralitas, dan tidak komersial, yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. Dengan prinsip penyiaran yang mengedepankan kepentingan untuk semua warga negara, menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan menjadi *Flag Carrier* dari bangsa Indonesia. Peran TVRI dan RRI begitu vital dimasa orde baru. TVRI betul-betul menjadi media paling ampuh dalam menyebarluaskan gagasan-gagasan pemerintah kala itu dan segala keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang telah berhasil dicapai.

Sayangnya, segala hal yang telah disebutkan diatas, belum mampu terlaksana sepenuhnya di kawasan perbatasan. Masyarakat di kawasan perbatasan merasa lebih nyaman dan telah terbiasa menikmati siaran-siaran dari jiran Malaysia. Siaran televisi Malaysia lebih mudah diakses dari pada siaran-siaran Indonesia¹⁹. Dominannya siaran televisi Malaysia di kawasan perbatasan, menyebabkan informasi mengenai Indonesia begitu kurang²⁰. Tidak jarang masyarakat bahkan lebih hafal nama-nama pejabat di negara tetangga, ketimbang Indonesia. Bahkan lagu kebangsaanpun, masyarakat di kawasan perbatasan lebih hafal lagu kebangsaan Malaysia²¹. Minimnya lembaga penyiaran di kawasan perbatasan dikarenakan lembaga penyiaran selalu melihat dari segi komersialisasi. Salah satunya adalah, yang terjadi di kecamatan Long Apari yang telah memiliki *tower* pemancar namun terkendala dana pengoperasionalan, mengingat akses menuju kawasan tersebut begitu susah, yang menyebabkan harga alat-alat penunjang menjadi begitu mahal. Akhirnya tower pemancar hanya menjadi perhiasan saja²².

¹⁹ Salah satu penulis (Mahendra Putra Kurnia) pada tanggal 19-21 September 2010 lalu, berkunjung ke Pulau Sebatik, sekarang Kalimantan Utara, yang merupakan kawasan yang berbatasan darat dan laut dengan Malaysia. selama 3 hari di sana, penulis melakukan pengamatan. Penulis menyimpulkan bahwa hal yang paling mengkhawatirkan adalah tergerusnya ideologi masyarakat setempat secara perlahan-lahan. Perubahan ideologi dari Pancasila ke ideologi negara tetangga dimungkinkan terjadi, Mereka lebih sering menonton siaran televisi dan radio milik Malaysia, jual beli sandang, papan dan pangan ke wilayah Malaysia karena akses yang lebih mudah, bekerja di perkebunan milik Malaysia bahkan bercakap-cakap dengan bahasa Malaysia serta mata uang Ringgit hal yang biasa atau mudah ditemui di kawasan tersebut dan masih banyak aspek-aspek kehidupan lainnya yang lebih “berkiblat” ke Malaysia daripada ke Indonesia.

²⁰ http://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2013/11/26/?temid=berita, berita dengan judul *KPI Rekomendasikan Insentif Untuk lembaga Penyiaran di Kawasan Perbatasan*, tanggal 26 November 2013, diakses pada tanggal 6 Maret 2014, Pukul 16.05 Wita.

²¹ <http://hariansenator.com/v1/berita-utama/553-jangkauan-radio-dan-tv-negeri-jiran-membahana-di-wilayah-pesisir-riau>, dengan tajuk berita berjudul *Hafal Nama Pejabat, Sampai Lagu Kebangsaan Negeri Tetangga*, Senin 6 Januari 2014. Diakses pada tanggal 10 Maret 2014, Pukul 12.12 Wita.

²² Wawancara dengan Bapak Awaluddin Madjid, S.T, Kepala Sub Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD), Provinsi Kalimantan Timur, Rabu, 22 Oktober 2014, Pukul 11:15-12:00 Wita.

Permasalahannya, tidak hanya terletak pada begitu pentingnya lembaga penyiaran harus masuk ke kawasan perbatasan. Tentu tidak hanya hal tersebut yang menjadi tujuan. Tujuan utamanya adalah memperkuat rasa nasionalisme, melalui lembaga penyiaran tersebut, diharapkan lembaga penyiaran tidak hanya sekedar menjadi media hiburan masyarakat di kawasan perbatasan, namun juga yang terpenting masyarakat merasakan hadirnya negara melalui media lembaga penyiaran. Barangkali kita harus berkaca dengan budaya K-Pop Korea yang berhasil menciptakan ekspektasi positif bagi negaranya, bahkan membuat daya jual produk-produk negaranya meningkat akibat ekspektasi masyarakat dunia terhadap budaya K-Pop tersebut²³.

Permasalahan berikutnya yang juga perlu diperhatikan, selain pentingnya wujud kehadiran negara di kawasan perbatasan melalui media lembaga penyiaran, namun hal yang juga sangat penting adalah wujud kehadiran negara dalam mendukung pengembangan lembaga penyiaran itu sendiri. Salah satu lembaga penyiaran tersebut adalah TVRI yang memang merupakan televisi nasional bangsa Indonesia. Untuk masuk ke kawasan perbatasan yang sebahagian besar masih terisolir, dengan medan yang begitu susah untuk diakses, secara langsung akan mempengaruhi pembiayaan yang begitu besar untuk melakukan operasional di kawasan perbatasan, di sinilah perlunya kehadiran negara, dalam “menyuburkan” TVRI dengan pendanaan yang besar. Tentu TVRI juga harus memperbaiki tampilan penyiarannya agar lebih menarik dan dapat meningkatkan tanggapan masyarakat terhadap siaran TVRI itu sendiri.

TVRI harus mampu menjadi media penghubung bagaimana agar rasa cinta tanah air masyarakat tetap terjaga, dan masyarakat di kawasan perbatasan tetap merasakan kehadiran negaranya sendiri walaupun terpisah jauh dari pemerintah pusat. Negara harus hadir dan diketahui segala perkembangannya oleh warga negaranya, bagaimanapun luasnya suatu negara tersebut. Media komunikasi yang tepat untuk menjadi jembatan antara pemerintah Indonesia dengan warganya di kawasan perbatasan adalah melalui siaran-siaran dari TVRI sebagai stasiun televisi resmi milik pemerintah. Selain sebagai media hiburan, juga sebagai media informasi dan penanaman nilai-nilai kebangsaan, agar nasionalisme itu terus terjaga. Dalam hal ini, TVRI mengemban amanah besar untuk menjaga rasa kebangsaan tersebut.

Untuk itu, TVRI bermaksud menjadi aktor utama penyiaran dalam menyediakan dan mengisi ruang publik, serta berperan dalam merekatkan dan mempersatukan semua elemen bangsa²⁴. Dampak penyiaran demikian besar dalam mempengaruhi opini dan bahkan menjadi referensi berfikir masyarakat. Tidak heran di era orde baru, TVRI betul-betul menjadi “primadona”, selain tentunya pada masa itu belum adanya stasiun-stasiun televisi swasta. Dampak yang nyata dari tidak hadirnya negara dalam rangka membentuk opini, dan

²³ Salah satu pemateri yakni Dr. Aji Sofyan Efendi, S.E, M.Si, Dalam Talk Show ASEAN Community 2015, Mengusung Kesiapan Kaltim Dalam Persaingan ASEAN Community 2015 dilaksanakan oleh BEM KM Unmul, Senin 17 November 2014. Memaparkan bahwa budaya K-Pop, selama ini selalu dilihat hanya dari para personilnya yang *Modis* dan *Glamour*, tidak hanya itu, salah satu unsur yang paling penting adalah hadirnya negara di dalam K-Pop itu, itu sebenarnya tujuan dari K-Pop tersebut.

²⁴ <http://www.tvri.co.id/page/visi-dan-misi>, diakses pada hari Kamis, 20 November 2014, Pukul 15:55 Wita.

menumbuhkan semangat cinta tanah air warga negara di kawasan perbatasan melalui lembaga penyiaran adalah, banyaknya warga negara Indonesia yang tidak hafal lagu kebangsaan Indonesia raya, namun hafal lagu kebangsaan Malaysia, bahkan hafal nama-nama pejabat negara tetangga tersebut. Tentu kita miris melihat fakta tersebut, bahwa secara administrasi mereka adalah warga negara Indonesia, namun secara naluri mereka lebih condong pada negara tetangga. Hal tersebut merupakan bahaya laten yang dapat menyebabkan Negara Indonesia secara perlahan-lahan dapat kehilangan wilayahnya.

Jika kita, mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah, terutama sejarah peperangan dan keruntuhan suatu bangsa, maka akan kita dapati bahwa takluk dan runtuhnya suatu negara, kebanyakan disebabkan adanya kerapuhan di dalam negara itu sendiri. Kerapuhan yang paling banyak menyebabkan runtuhnya suatu negara adalah rapuhnya rakyat suatu negara itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena rakyat negara tersebut, merasa seolah-olah tidak menjadi bagian penting dari negaranya, terpinggirkan, terisolasi dan terlupakan. Sehingga rakyat akan kecewa jika diperlakukan demikian. Dalam masa-masa kecewa tersebut, secara psikis akan membuat seseorang begitu mudahnya bertindak responsif terhadap permasalahan yang dihadapinya. Maka tidak heran jika masyarakat di kawasan perbatasan banyak yang “berteriak” agar diperhatikan, akibat kurangnya kehadiran negara di kawasan perbatasan terutama yang paling penting adalah kurangnya kehadiran negara di hati masyarakat di kawasan perbatasan. TVRI memiliki peranan penting untuk menjembatani dan menjadi wakil pemerintah dalam rangka mewujudkan bentuk kehadiran negara di kawasan perbatasan yang selama ini dirasa kurang. TVRI akan menjadi media penyebar rasa cinta tanah air, penyampai informasi dari pemerintah kepada rakyat di kawasan perbatasan dan representasi kehadiran negara. Tentunya untuk mewujudkan itu semua, diperlukan suntikan dana agar TVRI dapat menjadi “primadona” kembali di hati rakyat Indonesia. Pendanaan juga diharapkan menjadi modal bagi TVRI untuk bersaing dengan stasiun televisi negara tetangga yang telah hadir di kawasan perbatasan. Sehingga secara perlahan-lahan akan merubah pilihan masyarakat yang tadinya begitu terbiasa mengkonsumsi siaran televisi negara tetangga, menjadi *familier* dengan stasiun televisi milik negara sendiri.

Selain TVRI, media siaran melalui radio pun perlu ditingkatkan di kawasan perbatasan. Mengingat tidak semua masyarakat mampu untuk memiliki televisi. Tentu masih ada masyarakat yang gemar mendengar siaran-siaran radio. Radio dapat menjadi media yang ampuh untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. RRI memiliki peran yang sama seperti TVRI dalam menjaga dan menumbuhkembangkan rasa nasionalisme. Terlebih siaran-siaran RRI sudah bervariasi, dengan siaran-siaran yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Siaran-siaran RRI sengaja dibagi-bagi menjadi beberapa bagian frekuensi agar memberikan pilihan yang bervariasi kepada konsumen, semisal Pro 1 khusus siaran untuk pemberdayaan masyarakat, Pro 2 untuk siaran khusus kreativitas anak muda, Pro 3 diperuntukkan khusus siaran berita nasional dan Pro 4 khusus menyiarkan mengenai siaran budaya dan pendidikan²⁵. Hal tersebut merupakan terobosan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

²⁵ <http://rri.co.id/index.php/profil#.UxwsvGqFC4>, diakses pada hari Minggu, 9 Maret 2014, Pukul 16:25 Wita.

Sayangnya terobosan tersebut belum mampu dirasakan di kawasan perbatasan, terutama di Sebatik. Siaran frekuensi radio nasional begitu buruk, bahkan tidak dapat dijangkau oleh radio-radio penduduk. Bahkan pada saat bulan ramadhan, masyarakat Sebatik lebih memilih mendengarkan siaran radio Malaysia, sekedar untuk mengetahui informasi apakah telah tiba saatnya untuk berbuka puasa. Masyarakat tidak mendengarkan siaran berbuka puasa dari radio nasional karena jaringan frekuensi siarannya buruk bahkan tidak dapat dijangkau²⁶. Untuk itu peran RRI juga begitu penting sebagai jembatan hadirnya negara di kawasan perbatasan. Sehingga bukan hanya TVRI yang berjuang melawan dominasi siaran televisi Malaysia di kawasan perbatasan, namun RRI juga turut andil dalam menggerus dominasi siaran radio Malaysia.

Ibarat sebuah lidi yang berserak, tentu tidak akan mampu membersihkan sebuah kotoran. Berbeda, lidi-lidi yang terserak tersebut disatukan, maka akan dapat membersihkan kotoran tersebut. Demikian pulalah dengan lembaga penyiaran yang lain, baik stasiun televisi swasta maupun stasiun radio swasta diharapkan terinspirasi agar dapat melebarkan siaran-siarannya hingga ke kawasan perbatasan. Tentunya masyarakat, di kawasan perbatasan tidak akan merasa bosan dengan siaran yang hanya berasal dari TVRI dan RRI saja. Sehingga ada pilihan yang bervariasi sesuai dengan minat masyarakat.

Demikianlah Kawasan perbatasan menjadi unsur yang begitu penting bagi Indonesia. Kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang Indonesia yang menjadi batas antara Indonesia dengan tetangganya. Ibarat pepatah "*jika kita ingin memperkuat keamanan suatu rumah maka yang kita perkuat adalah pagar atau pintu gerbangnya*". Namun justru pepatah tersebut belum berlaku di kawasan perbatasan. Bukan hanya dari segi kesejahteraan yang masih belum begitu diperhatikan, namun juga wujud kehadiran negara di kawasan perbatasan masih sangat kurang. Hal tersebut jika dibiarkan, secara lambat laun akan mengurangi rasa nasionalisme warga negara di kawasan perbatasan. Salah satu cara untuk menciptakan jembatan dari kurangnya kehadiran negara di kawasan perbatasan adalah dengan cara mendorong TVRI sebagai televisi resmi milik pemerintah untuk masuk ke kawasan perbatasan yang terisolir. Sehingga masyarakat akan merasa tetap menjadi bagian dari NKRI, walaupun jarak antar wilayah yang satu begitu jauh, namun koneksi keterhubungan tetap dirasakan masyarakat. Untuk itu lembaga penyiaran merupakan unsur penting yang dapat menumbuhkan nasionalisme, serta mewakili negara di kawasan perbatasan.

²⁶ Wawancara dengan Suharto, Mahasiswa Fakultas Hukum asal Sebatik yang juga merupakan anggota Perhimpunan Mahasiswa Sebatik (HIPMAS) pada hari Senin, 24 November 2014, Pukul 11:35 Wita. Ia betul-betul mengeluhkan bahwa setiap pagi ia akan mendengar lagu kebangsaan Malaysia, jika berusaha mencari frekuensi gelombang radio, dan yang ditangkap dengan begitu jelas merupakan frekuensi gelombang radio milik Malaysia.

